

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Belanja Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004 :223).

Pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian (Usman Berto, 2021:75).

Belanja pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menurut Bastian (2006), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun takwim dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Sementara menurut Mardiasmo (2005), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral

dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja”.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:42), belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat

tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya, yang umumnya diperlukan secara periodik.

Karakteristik belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut:

1. Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan)
2. Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Belanja Pemerintah | 5. Belanja bantuan Sosial |
| 2. Belanja Bunga | 6. Belanja Bagi Hasil |
| 3. Belanja Subsidi | 7. Bantuan Keuangan, dan |
| 4. Belanja Hibah | 8. Belanja Tidak terduga |

Soleh dan Rochmansjah (2010:46) menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut:

1. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan.
2. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.

3. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Pegawai
3. Belanja modal.

2.1.1.1 Teori Dasar pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat, 2010). Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro (Usman Berto, 2021: 75) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Wagner

Wagner (1892) mengemukakan suatu teori yang berhubungan dengan pola perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar, terutama dalam persentasenya terhadap Gross National Product (GNP) yang juga didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Dari hasil pengamatan yang dilakukannya terhadap banyak Negara pada abad 19, Wagner menyimpulkan dan mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hukum.

Namun dalam pandangannya tersebut tidak secara spesifik dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP. Apakah yang dimaksudkan oleh Wagner adalah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif, ataukah secara absolut. Jika yang dimaksudkan Wagner (1892) adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner dapat dituliskan sebagai berikut:

"Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif, maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat."

Hukum Wagner (1892) juga memiliki kelemahan, yang mana hukum tersebut tidak didasarkan pada teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Pandangan yang menjadi dasar pada pengembangan teori yang digunakan (Usman Berto, 2021:78).

2. Teori Keynes

Keynes (1998) berpendapat bahwa peran serta dan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian masih sangat diperlukan. Kondisi ini terutama sangat dibutuhkan apabila perekonomian sepenuhnya diatur dalam skema kegiatan pasar bebas, bukan saja pada saat perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga pada saat kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Namun demikian, volatilitas kegiatan ekonomi yang cenderung fluktuatif dari satu periode ke periode lainnya akan berimplikasi serius kepada kesempatan kerja, dan turut berpengaruh pada tingkat pengangguran serta harga barang maupun jasa (Usman Berto, 2021:75).

2.1.1.2 Faktor-faktor Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut (Sukirno, 2016:168):

1. Proyeksi Jumlah Pajak Yang Diterima

Salah satu faktor yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

2. Tujuan-tujuan Ekonomi Yang Ingin dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentu pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi kearah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatannya yang diperoleh dari pajak.

3. Pertimbangan Politik dan Keamanan

Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Siregar 2015:36) pemerintah daerah menggunakan data dan kondisi daerah untuk membentuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD. Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam penyusunan APBD salah satunya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2013).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bmto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki *residen* atau *non-residen*.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2023).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun-n (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut (Machmud, 2016) Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini, disebabkan karena faktor- faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Para ahli ekonomi sudah sejak lama berusaha untuk memahami konsep pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat di suatu negara ini. Dari pemikiran mereka, dihasilkanlah aneka teori pertumbuhan ekonomi yang bisa kita pelajari. Teori pertumbuhan ekonomi ini dapat diklasifikasikan ke dalam

beberapa kelompok, yakni teori klasik, teori neoklasik, teori neokeynes, teori W.W. Rostow, dan teori Karl Bucher (Sukirno, 2013:432).

2.1.2.1 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik ini sudah dikembangkan sejak abad ke-17. Ada dua tokoh yang paling berpengaruh terhadap pemikiran teori klasik ini, yakni Adam Smith dan David Ricardo (Sukirno, 2013:433).

1. Teori Adam Smith

Adam Smith adalah tokoh klasik yang banyak membahas mengenai teori-teori ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes Wealrth of Nation* (1776), Adam Smith menguraikan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total, yaitu:

- **Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu negara akan membuat tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar. Bersamaan dengan itu, output total yang melindungi barang dan jasa dipengaruhi juga oleh tiga faktor penting yaitu sumber daya alam, jumlah persediaan barang, dan juga tenaga kerja.

- **Tingkat Pertumbuhan Output Total**

Untuk menghasilkan pertumbuhan output, dengan jumlah tenaga kerja yang besar maka pengelolaan sumber daya pun akan semakin menjadi lebih besar.

Adam Smith menyatakan jika pengelolaan sumber daya alam dapat dimaksimalkan maka akan menghasilkan pertumbuhan output yang juga maksimal. Selanjutnya karena pertumbuhan output yang dimanfaatkan secara maksimum, maka hal tersebut memiliki sebuah pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

2. Teori David Ricardo

Pemikiran David Ricardo dalam hal pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal adalah tentang the law of diminishing return. Pemikirannya ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Menurutnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

2. Teori Neoklasik

Dalam Teori Neoklasik Pertumbuhan Ekonomi, dua tokoh yang paling populer adalah Joseph A Schumpeter dan Robert Solow (Sukirno, 2013).

1. Teori Joseph A Schumpeter

Menurut Joseph A Schumpeter dalam bukunya yang berjudul The Theory of Economic Development, membahas mengenai peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para innovator dan wirausahawan.

2. Teori Robert Solow

Robert Solow berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada empat faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2013) “Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal, Teknologi dan sebagainya”.

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan serta kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah akan mempermudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tidak dapat membangun dengan cepat.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian SDM meliputi kualitas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

c. Modal

Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Pembentukan modal atau akumulasi merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk menaikkan stok modal, Output nasional dan pendapatan nasional. Sehingga pembentukan modal menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional dengan bermacam-macam cara. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi juga akan membawa ke arah kemajuan teknologi.

d. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, modal dan faktor produksi yang lain.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (Sinarni, 2017:17).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur

yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup di nikmati standar hidup yang layak. Menurut (Abdul hakim, 2002:53) ada lima cara pengembangan sumber daya manusia:

- a. Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.
- b. Latihan jabatan, termasuk model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan.
- c. Pendidikan yang di organisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi.
- d. Program studi bagi orang dewasa yang tidak di organisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian.
- e. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

2.1.3.1. Komponen- Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup identik dengan aspek kesehatan yang merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kemampuan penduduk dalam hal seberapa lama harapan hidup dapat mencapai yang mengisyaratkan tingkat kesehatan. Angka harapan hidup juga sangat dipengaruhi oleh banyak kematian bayi dan balita yang memang masih sangat rentan hidupnya serta kematian ibu saat melahirkan. Kematian dapat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan penduduk yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, dan kebersihan lingkungan. Angka kematian bayi dan balita terjadi selain disebabkan oleh kurangnya asupan gizi juga disebabkan oleh keadaan lingkungan disekitar, seperti: sumber air bersih, fasilitas buang air besar serta jarak pembuangan tinja dari saluran air.

2. Angka Melek Huruf (AMH)

Rata-rata Lama Sekolah Tingkat melek huruf/buta huruf dan angka partisipasi sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk, selain seberapa lamanya waktu sekolah yang ditempuh. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas yang berdasarkan pendidikannya, mewujudkan program wajib sembilan tahun, selain itu peningkatan program-program bagi mereka yang belum memiliki ijazah dengan mengupayakan program kejar paket dan sebagainya. Walaupun masih merupakan sebuah tantangan bagi dunia pendidikan khususnya pemerintah dan dinas terkait agar lebih meningkat kualitas pengetahuan penduduknya baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun informal diluar sekolah seperti menggalakkan program-

program Kejar Paket atau memperbanyak sekolah-sekolah terbuka di wilayah yang sulit dijangkau.

3. Daya Beli

Untuk menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Dalam mengukur tingkat perekonomian daerah dapat digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan suatu proses kegiatan perekonomian di suatu wilayah yang dihitung dari seluruh pencapaian transaksi yang dilakukan oleh penduduk dari berbagai sektor, sehingga apabila PDRB suatu daerah tinggi maka dapat disimpulkan bahwa makin tinggi pula tingkat perekonomian daerah tersebut.

2.1.3.2. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Septiarini dan Hernianingrum (2017). Dalam UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihanpilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

2.1.3.3. Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Fajri, 2021), berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

a. Kesehatan

Mils dan Gilson (1990) dalam Dimas (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal yaitu alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan, jumlah sumber daya yang di gunakan dalam pelayanan kesehatan, pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan, efisiensi pengalokasian dan

penggunaan berbagai sumber daya dan dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Angka harapan hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

b. Pendidikan

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih

tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

c. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (BPS, 2012).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta

berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013)

d. Kemiskinan

Ketika tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan keahlian yang rendah, keterkucilan sosial karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Singkatnya, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah yaitu suatu tingkat 15 kekurangan dalam materi pada sejumlah atau segolongan orang daripada standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan dalam Dewi, 2011).

2.2 Teori Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Peranan pemerintah dalam pembangunan manusia adalah melalui pengeluaran pemerintah sektor publik yang tercermin pada anggaran di bidang kesehatan yang fungsinya untuk meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Sedangkan untuk anggaran dibidang pendidikan berfungsi untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, dengan harapan angka melek huruf dapat meningkat. Menurut (kuncoro, 2004) terdapat tiga indikator untuk mengukur IPM. Yang pertama adalah angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*) yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk, yang kedua angka

melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) yaitu digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan, dan yang ketiga adalah kemampuan daya beli (*purchasing powerparity*) yang digunakan untuk mengukur standar hidup masyarakat.

Hukum wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila indeks pembangunan manusia atau standar hidup masyarakat meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, Pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (siska, 2019).

Berdasarkan kepada hasil kajian empiris sebelumnya tentang belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan memberikan hasil yang berbeda seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ariyati, et al (2018) menyimpulkan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah yang di proksi ke dalam belanja modal tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap IPM pada empat kabupaten di Provinsi Aceh selama periode tahun 2011-2015. Sedangkan raharjo (2005) menyatakan bahwa belanja pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten mimika.

2.2.2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui kesempatan kerja (Musriyati, 2021). Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki keterkaitan satu sama lain karena apabila tingkat pertumbuhan ekonomi baik maka pembangunan manusia pun akan membaik. Menurut (Mirza, 2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dapat dilihat melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran pemerintah mengidentifikasi besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia. Dapat dikatakan pengeluaran pemerintah merupakan hal utama yang memicu adanya suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa “social development is economic development”. Sumber daya manusia dari suatu bangsa, bukan modal fisik atau sumber daya material, merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan (Irawan, 2022).

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Irawan, 2022). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan

output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator. Berdasarkan kepada hasil kajian empiris sebelumnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan memberikan hasil yang berbeda seperti penelitian yang telah dilakukan oleh diah komariah (2019) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kotawaringin Timur periode tahun 2009-2017. Sementara hasil studi yang dilakukan oleh abie racman muhamad (2023) menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Helly Aroza Siregar (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia, serta untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Belanja Modal dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan data sekunder tahun 2007 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekanbaru untuk mengumpulkan data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear

berganda dan Multiple Regression Analysis (MRA) untuk melihat efek moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM, sementara Belanja Modal tidak dapat dijadikan variabel pemoderasi karena adanya Belanja Modal tidak dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM.

Noviatamara, A (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pusat Statistika Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan uji t dan uji F. Dari hasil analisis diketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien regresi sebesar -3.539 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien regresi sebesar -1.476.

Diah Komariah (2019) penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2009-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah analisis regresi linier berganda (multiple linear regression) dengan menggunakan bantuan perangkat IBM SPSS Version 25.0.

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa secara parsial belanja modal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kotawaringin Timur periode tahun 2009-2017.

Abie Racman Muhamad (2023) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kemiskinan, teknologi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan yaitu sekunder yang diperoleh dari BPS Jawa Barat, dan BPS Nasional serta dari berbagai literatur serta publikasi ilmiah. Jenis data yang digunakan adalah time series yaitu 2007-2021. Proses analisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan program Eviews 12. Dapat disimpulkan bahwa, variabel teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021 dengan nilai koefisien sebesar $-0,193230$ dan nilai probabilitasnya sebesar $0,0111$, variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021 dengan nilai koefisien sebesar $-1,541790$ dan nilai probabilitasnya $0,0571$, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari nilai koefisiennya sebesar $1.73E-10$ dengan nilai probabilitasnya yaitu $0,0131$, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.

Imam Agus Sutono (2022) Realisasi belanja pemerintah di Provinsi Riau cenderung fluktuatif selama tahun 2015- 2020. Sedangkan nilai Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) cenderung naik setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 di mana terjadi penurunan namun kembali naik di tahun berikutnya. Nilai IPM Provinsi Riau selalu lebih tinggi dari nilai rata-rata IPM secara nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali sejauh mana pengaruh belanja pemerintah pada IPM di Provinsi Riau, yang meliputi belanja pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda). Kajian ini dilakukan dengan metode kuantitatif memakai analisis regresi data panel. Data yang diteliti berasal dari 12 pemda (kabupaten dan kota) yang berada di Provinsi Riau pada rentang waktu enam tahun (2015-2020). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyerapan belanja pemda tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM, sedangkan penyerapan belanja pempus berpengaruh signifikan pada IPM. Secara bersama-sama, penyerapan belanja pemda dan penyerapan belanja pempus berpengaruh signifikan pada IPM.

Jahtu Widya Ningrum (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. Pengolahan data Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan pendekatan pool model menggunakan Software Eviews 9 menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data yang telah dipublikasikan di beberapa sumber, Badan Situs web Pusat Statistika dan Kementrian Keuangan periode 2014 hingga 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, yaitu: ditunjukkan dengan

nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (0,05), sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan variabel pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai alfa (0,05). Secara simultan semua variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap IPM dan memiliki pengaruh yang ditunjukkan melalui R² sebesar 80,78% menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel Y, sisanya 19,22% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Abu Bakar (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika, serta menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Mimika dan Divisi Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika melalui teknik dokumentasi. Untuk menganalisis data, digunakan analisis regresi berganda semi log. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Belanja Konsumsi Rumah Tangga, yang diprosikan dari pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan, berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika; (b) Belanja pemerintah, yang diprosikan dari pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika; dan (c) Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga dan Belanja Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika.

Jehuda Jean Sanny Mongan (2019) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan sektor kesehatan mempengaruhi IPM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 32 provinsi selama periode tujuh tahun 2000-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan.

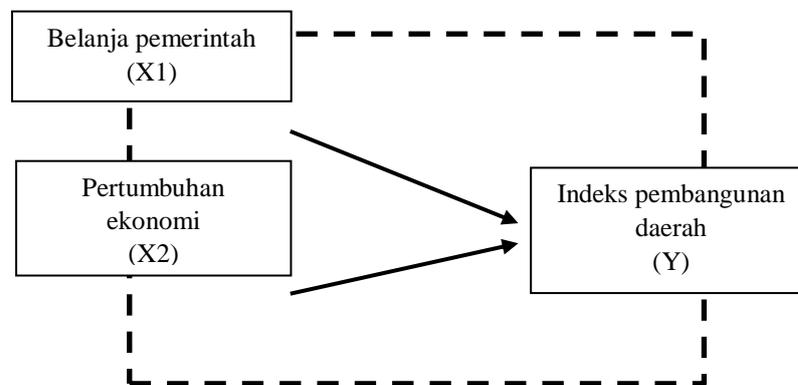
A.Mahendra (2020) Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan sektor, inflasi, dan kemiskinan pada indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderat variabel di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Indonesia dan 20 di antaranya terpilih menjadi Sampel untuk penelitian ini melalui teknik purposive sampling. Perkiraan yang dilakukan oleh kelipatan Analisis regresi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari Pemerintah Indeks Pengeluaran, Inflasi, dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia untuk tahun 2000-2019. Hasil Dari penelitian ini, bahwa Berdasarkan uji parsial (uji t), variabel Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan sedangkan variabel Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan

terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Indonesia, uji simultan (uji F), pengeluaran pemerintah, inflasi, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Ekonomi Variabel pertumbuhan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengeluaran pemerintah, inflasi dan kemiskinan pada indeks pembangunan manusia.

Dita Ayu Antika (2020) Pembangunan manusia merupakan isu global yang dialami hampir di setiap negara. Masalah pembangunan manusia menjadi masalah yang harus diselesaikan dalam sebuah secara berkelanjutan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan pemerintah pengeluaran, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi pada indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup 20 negara anggota APEC di Periode 2012-2017. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model Fixed Effect (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara belanja pemerintah di sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori-teori diatas yang mengatakan bahwa Belanja pemerintah (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2088-2022. Bahwa secara sederhana kerangka pemikiran dapat dirumuskan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

—————> : Parsial

-----> : Simultan

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Diduga belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia diprovinsi sumatera selatan tahun 2008-2022 baik secara parsial maupun simultan.